MAJELIS ULAMA INDONESIA

KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat: Jl. …… Samarinda, Kalimantan Timur

KEPUTUSAN FATWA

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: ……/MUI-Kaltim/……/2026

TENTANG

NIKAH BATIN ATAU NIKAH DAUD

(NIKAH TANPA WALI DAN/ATAU TANPA SAKSI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, setelah:

MENIMBANG : a. bahwa maraknya fenomena nikah batin yang terjadi di masyarakat sebagai bahan pelaporan atas tindakan pelecehan seksual

b. bahwa adanya klaim bahwa nikah batin adalah pernikahan yang sah secara agama Islam yang disandarkan kebolehannya kepada pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Dāwud aẓ-Ẓāhirī — sehingga hubungan yang terjadi bukan merupakan perbuatan zina

c. bahwa klaim demikian berpotensi menyesatkan masyarakat, menciderai kehormatan institusi pernikahan yang mulia dalam Islam, dan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan penodaan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa yang tegas dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa;

MENGINGAT :

1. Firman Allah
   a. Firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan izin dan sepengetahuan wali:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya..." :*maka nikahilah mereka dengan izin wali mereka (keluarga mereka) dan berikanlah maskawin mereka dengan cara yang patut." (QS. An-Nisa' [4]: 25). Ayat ini secara*

eksplisit mensyaratkan izin wali (أَهْل) *sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan yang sah*.

b. Firman Allah SWT yang menegaskan kewenangan wali dan mengindikasikan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa keikutsertaan mereka:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya" :*Dan apabila kamu menceraikan perempuan, lalu sampailah masa iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah kembali dengan calon suami mereka, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (QS. Al-Baqarah [2]: 232 .*(*Ayat ini menyiratkan bahwa wali memiliki kewenangan atas pernikahan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga larangan menghalang-halangi* (عضل) *hanya bermakna apabila wali memang memiliki peran yang wajib dijalankan*.

c. Firman Allah SWT mengenai hak-hak perempuan yang hanya lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya" :*Dan pergaulilah mereka (para perempuan) dengan cara yang patut (ma'ruf)." (QS. An-Nisa' [4]: 19). Hak-hak ini hanya timbul dari pernikahan yang sah; "nikah batin" yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun antara kedua belah pihak*.

d. Firman Allah SWT mengenai larangan mendekati zina dan segala jalan yang mengantarkan kepadanya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya" :*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32*(

e. Firman Allah SWT mengenai ancaman hukum bagi pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya" :*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah*

kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. An-Nur [24]: 2)

f. Firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan izin dan sepengetahuan wali:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya..." :*maka nikahilah mereka dengan izin wali mereka (keluarga mereka) dan berikanlah maskawin mereka dengan cara yang patut." (QS. An-Nisa' [4]: 25).* Ayat ini secara eksplisit mensyaratkan izin wali *(أَهْل)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan yang sah.

g. Firman Allah SWT yang menunjukkan pengecualian dalam perkataan yang dilarang seperti ghibah, yaitu kondisi ada seorang yang didzolimi:

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّـــوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗوَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

Artinya: *"Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nisa' [4]: 148).* Ayat ini Adalah dalil tentang beberapa ghibah dan perkataan terlarang yang dikecualikan oleh kondisi tertentu.

2. Hadis Rasulullah saw, antara lain :
   a. Sabda Nabi SAW mengenai keharusan adanya wali dalam setiap pernikahan yang sah:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya" :*Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Abū Dāwud no. 2085, at-Tirmiżī no. 1101, Ibnu Mājah no. 1881, Ahmad no. 24954, dari 'Āisyah RA)*

   b. Sabda Nabi SAW mengenai keharusan adanya wali dan dua saksi yang adil:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلْ

Artinya" :*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ibnu Ḥibbān no. 4075, Al-Baihaqī no. 13633; di-sahih-kan oleh Ibnu Ḥibbān)*

   c. Sabda Nabi SAW mengenai batalnya pernikahan yang dilaksanakan tanpa izin wali:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

Artinya" :*Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal, batal, batal." (HR. Abū*

Dāwud no. 2083, at-Tirmiżī no. 1102, Ahmad no. 24205, dari 'Āisyah RA(

d. Sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa pernikahan yang sah harus diumumkan secara terbuka — bertentangan dengan hakikat "nikah batin" yang tersembunyi dari wali dan masyarakat:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya" :*Pembeda antara yang halal dan yang haram (dalam pernikahan) adalah rebana dan pengumuman dalam pernikahan." (HR. at-Tirmiżī no. 1088, Ibnu Mājah no. 1896, Ahmad no. 15709). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sah bersifat terbuka dan diketahui masyarakat, bukan sesuatu yang disembunyikan*.

e. Sabda Rasulullah tentang larangan diam terhadap perboatan dosa, serta larangan menghujat pelaku yang tidak termasuk prosedur pengegakan hukum, serta larangan ghibah **dengan pengecualian** untuk tujuan penegakan hukum

الذنبُ شــؤمٌ على غيرِ فاعلهِ، إنْ عيَّرَهُ ابتُلِيَ بهِ، وإنِ اغتابهَ أَثِمَ، وإنْ رضِيَ بهِ شاركَهُ.

Artinya: *"Dosa adalah racun bagi orang di sekataranya meskipun bukan pelaku, apabila seorang mencela pelaku ia akan diuji dengan dosa itu, apabila menghibah (dengan ghibah tidak syar'i) makai a berdosa, dan apabila ia berdiam diri saja(tidak melakukan nahi munkar) maka berarti terlibat dalam kemaksiatan tersebut"(HR. al-Dailami no. 3196).* Hal ini merupakan larangan berdiam diri terhadap kemaksiatan yang meluas serta larangan terhadap tindakan yang tidak berhubungan dengan nahi munkar dan upaya penegakan hukum.

3. Kaidah Ushuliyyah:

a. Kaidah tentang perintah yang menunjukkan kewajiban (terkait perintah menikah dengan izin wali):

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوُجُوب

Maksudnya: "*Hukum asal dalam suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban.*"
Penjelasan: Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 25 ("*Fankihuhunna bi idzni ahlihinna*") menggunakan bentuk kata perintah (amr). Hal ini menunjukkan bahwa meminta izin wali dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, bukan sekadar anjuran.

b. Kaidah tentang larangan yang menuntut kerusakan/kebatalan (terkait larangan nikah tanpa wali):

النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ

Artinya: "*Larangan (dari syariat) itu menuntut rusaknya (batalnya) keabsahan dalam ibadah dan akad.*"
Penjelasan: Sabda Nabi SAW yang menegaskan batilnya pernikahan tanpa izin wali menunjukkan bahwa larangan tersebut berimplikasi langsung pada tidak sahnya (batal demi hukum) akad pernikahan yang dilakukan.

4. Kaidah Fiqhiyyah:

a. Kaidah tentang Ridha terhadap suatu hal otomatis ridho terhadap segala konsekuensi dan dampaknya:

الأصل في الأبضاع التحريم

Maksudnya: "*Hukum asal dalam urusan hubungan seksual(kemaluan) Adalah haram*"

b. Kaidah tentang tidak dianggapnya dugaan yang salah, berkaitan dengan klaim kebolehan dari imam adz-Dzohiri:

يحتاط فِي الْفُرُوجِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْأَمْوَالِ

Artinya: "*Diambil sikap berhati-hati dalam urusan kemaluan melebihi sikap berhati-hati dalam harta benda*"

b. Kaidah tentang hubungan seksual di luar kepemilikan budak selalu berakhir dengan pembayaran mahar(nikah sah) atau hukuman:

لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة

Maksudnya: "*setiap hubungan seksual selain terhadap budak sendiri, selalu dibarengi pembayaran mahar(nikah sah) atau hukuman*"

c. Kaidah tentang tidak dianggapnya ketidak-tahuan tentang perkara jelas dalam agama, dalam konteks ini larangan menikah tanpa wali dan saksi:

كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل

Artinya: "*Setiap orang yang tidak mengetahui keharaman sesuatu dalam suatu kasus Dimana kebanyakan orang tahu keharamannya, maka alasannya tidak diterima*"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Al-Qudūrī (w. 428 H) dalam Mukhtaṣar Al-Qudūrī — kitab pokok mazhab Hanafi — menegaskan bahwa saksi merupakan syarat mutlak sahnya pernikahan, bahkan dalam mazhab yang paling ringan dalam persoalan wali sekalipun:

وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ رَجُلْ وَامْرَأَتَيْنِ

Artinya" :*Nikah orang-orang Islam tidak dapat terlaksana kecuali dengan kehadiran dua orang saksi yang merdeka, baligh, berakal, dan muslim, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan." (Mukhtaṣar Al-Qudūrī). Ini membuktikan bahwa pernikahan tanpa saksi batal menurut seluruh ulama Hanafiyyah*.

2. Dalam Al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-Arba'ah (IV/46), yang merangkum pandangan keempat mazhab secara komprehensif, dinyatakan:

قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى عَدِّ الْوَلِيِّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ لَا يَتَحَقَّقُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِدُونَهُ وَاصْطَلَحَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدِّهِ شَرْطًا لَا رُكْنًا

Artinya" :*Telah kamu ketahui bahwa Syafi'iyyah dan Malikiyyah menjadikan wali sebagai rukun nikah yang tanpanya pernikahan tidak terlaksana, sedangkan Hanabilah dan Hanafiyyah menjadikannya sebagai syarat. Adapun saksi, seluruh mazhab bersepakat bahwa nikah tidak sah tanpanya." (Al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-Arba'ah, IV/46*(

3. Pendapat al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-Haitamī (w. 974 H) berfatwa tegas mengenai larangan mengikuti pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī dalam pernikahan dan konsekuensi hukumnya:

لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَمَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ خَالٍ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ

Artinya" :*Tidak diperbolehkan mengikuti (taqlid kepada) Dāwud dalam nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Barang siapa yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang tidak memiliki keduanya (wali dan saksi), maka wajib atasnya had zina berdasarkan pendapat yang mu'tamad (kuat dan dipedomani)." (Fatawa Ibnu Ḥajar al-Haitamī*(

4. Dalam kitab At-Taqlib wa al-Ijtihad (hlm. 22–23), dikuatkan pula oleh al-'Allamah al-Syibrāmalsī dalam catatannya atas Al-Nihāyah:

وَمِنْهَا مَا نُسِبَ إِلَى دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ مِنَ جَوَازِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ وَمِمَّنْ يُصحُّ بِحُرْمَةِ تَقْلِيدِهِ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْعَلَّامَةُ الشِّبْرَامَلْسِيُّ فِي حَوَاشِي النِّهَايَةِ

Artinya" :*Di antara (pendapat yang tidak boleh diikuti) adalah apa yang dinisbatkan kepada Dāwud aẓ-Ẓāhirī tentang kebolehan nikah tanpa wali dan saksi. Tidak dianggap valid apa yang disebutkan sebagian ulama tentang bolehnya mengikuti pendapat tersebut. Di antara ulama yang membenarkan haramnya mengikuti pendapat ini adalah al-'Allamah al-Syibrāmalsī dalam catatan pinggirnya atas Al-Nihāyah." (At-Taqlib wa al-Ijtihad, hlm. 22–23)*

5. Pendapat Al-Imam Ibnu Ḥazm al-Andalusī (w. 456 H) dalam Al-Muḥallā bil Āṡār (Juz IX) — kitab induk mazhab Ẓāhirī — justru secara tegas menolak nikah tanpa wali bagi seluruh perempuan, baik gadis maupun janda, sehingga mazhab yang kerap dijadikan sandaran pun pada hakikatnya membantah praktik ini:

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ — ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا — إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الأَبِ، أَوِ الإِخْوَةِ، أَوِ الْجَدِّ، أَوِ الأَعْمَامِ، أَوْ بَنِي الأَعْمَامِ — وَإِنْ بَعُدُوا — وَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ أَوْلَى

Artinya" :*Masalah: Tidak halal bagi seorang perempuan — baik janda maupun perawan — untuk menikah kecuali dengan izin walinya: bapak, saudara-saudaranya, kakek, paman-pamannya, atau anak laki-laki dari pamannya — meskipun jauh — dan yang terdekat lebih berhak." (Al-Muḥallā bil Āṡār, Juz IX). Ini menegaskan bahwa Al-Muḥallā — rujukan utama mazhab Ẓāhirī — bukanlah kitab yang membolehkan nikah tanpa wali, melainkan justru membantahnya*.

6. Pendapat al-Qāḍī Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid (Juz II, hlm. 36) menukil pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī secara terbatas — hanya menggugurkan syarat wali bagi janda, bukan menggugurkan saksi, dan tidak pula bagi perempuan yang masih gadis:

   وَفَرَّقَ دَاوُدُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ

   Artinya" :*Dāwud membedakan antara perawan dan janda. Ia berkata: disyaratkan wali dalam pernikahan perempuan yang masih perawan, dan tidak disyaratkan wali dalam pernikahan wanita yang telah menjadi janda." (Bidāyat al-Mujtahid, Juz II, hlm. 36*(

7. Pendapat Al-'Allamah 'Abdul Wahhab asy-Sya'rānī (w. 973 H) dalam Al-Mīzān al-Kubrā (Juz II, hlm. 102) menukil pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī dengan cakupan yang sama terbatasnya — hanya menggugurkan syarat wali bagi janda, tanpa sama sekali menyinggung gugurnya saksi:

   وَمَعَ قَوْلِ دَاوُدَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا صَحَّ

   Artinya" :*Dan bersama pendapat Imam Dāwud: Jika perempuannya masih perawan, maka nikahnya tidak sah tanpa wali; namun jika janda, maka sah nikahnya tanpa wali." (Al-Mīzān al-Kubrā, Juz II, hlm. 102). Dengan demikian, dua nukilan yang paling otoritatif atas pendapat Dāwud — Bidāyat al-Mujtahid dan Al-Mīzān al-Kubrā — hanya menggugurkan wali bagi janda dan sama sekali tidak menggugurkan saksi, sehingga klaim "nikah tanpa wali dan tanpa saksi" tidak memiliki sandaran yang sah bahkan pada pendapat Dāwud sendiri*.

8. Pendapat 'Abdurrahman Ba'alawi dalam Bugyat al-Mustarsyidīn (hlm. 14) menegaskan ijmā' yang dinukil Ibnu aṣ-Ṣalāḥ bahwa taqlid kepada selain imam mazhab yang empat tidak diperbolehkan:

   مَسْأَلَةٌ: نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَيْ حَتَّى الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَنِ

الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى، لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِنِسْبَتِهَا لِأَرْبَابِهَا بِأَسَانِيدَ تَمْنَعُ التَّحْرِيفَ وَالتَّبْدِيلَ

Artinya" :*Ibnu aṣ-Ṣalāḥ menukil ijmā': tidak boleh bertaqlid kepada selain imam yang empat — bahkan untuk amal pribadi sekalipun, apalagi untuk memutuskan perkara dan berfatwa — karena penisbatan pendapat-pendapat tersebut kepada pemiliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sanad yang terhindar dari distorsi dan perubahan." (Bugyat al-Mustarsyidīn, hlm. 14). Dengan demikian, berdalih dengan pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī tertolak pula dari sisi kaidah taqlid itu sendiri*.

9. Dalam kitab yang sama, Al-Muḥallā bil Āṡār (Juz IX), pendapat Ibnu Ḥazm juga mewajibkan walīmah atas setiap orang yang menikah — sebuah unsur keterbukaan yang mustahil dipenuhi oleh "nikah batin" yang disembunyikan, bahkan menurut mazhab Ẓāhirī yang kerap dijadikan sandaran:

مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُولِمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya" :*Diwajibkan atas setiap orang yang menikah untuk mengadakan walīmah dengan sesuatu yang sedikit atau banyak. Rasulullah SAW pun bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf: Adakanlah walīmah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing." (Al-Muḥallā bil Āṡār, Juz IX). Dengan demikian, walīmah yang bersifat terbuka dan diketahui publik merupakan bagian dari pernikahan bahkan dalam mazhab Ẓāhirī, sehingga "nikah batin" yang sengaja disembunyikan justru bertentangan dengan mazhab yang dijadikan dalih*.

10. Pendapat al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā memperkuat dengan kaidah bahwa perbedaan pendapat yang lemah tidak diperhitungkan, sehingga sekalipun diandaikan pendapat Dāwud sahih penisbatannya, ia tetap tidak dihiraukan dalam masalah ini:

فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ دَاوُدَ قَائِلٌ بِحِلِّ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، عَلَى أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنَعُوا مِنْ تَقْلِيدِهِ كَسَائِرِ الظَّاهِرِيَّةِ

لِأَنَّهُمْ لِإِنْكَارِهِمُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ يَرْتَكِبُونَ السَّفْسَافَ مِنَ الْآرَاءِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِآرَائِهِمْ ... بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا، فَاتَّضَحَ الْحَدُّ فِيهِ وَبَطَلَ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ

Artinya" :*Seandainya diandaikan Dāwud berpendapat halalnya hal itu, pendapatnya tetap tidak dihiraukan. Terlebih, banyak dari ulama kami (Syafi'iyyah) melarang taqlid kepadanya sebagaimana kepada seluruh Ẓāhiriyyah, sebab akibat penolakan mereka terhadap qiyas yang jelas, mereka terjatuh pada pendapat-pendapat yang tak bernilai (safsaf), sehingga pendapat mereka tidak diperhitungkan ... berbeda dengan pernikahan yang kosong dari wali, saksi, dan pengumuman: sama sekali tidak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya, apalagi sekadar menganggapnya pendapat ganjil (syāż); maka jelaslah keberlakuan had padanya dan gugurlah pendapat yang menyelisihinya." (al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Ibnu Ḥajar al-Haitamī, Juz IV*(

11. Di antara kekhususan (khaṣīṣah) Nabi SAW yang ditegaskan para ulama adalah sahnya pernikahan beliau tanpa wali dan tanpa saksi — suatu pengecualian dari kaidah umum yang mensyaratkan wali dan dua saksi, sehingga justru menegaskan bahwa jalan tersebut tertutup bagi selain beliau. Kekhususan ini bersandar pada kitab induk berikut:
    a. Al-Qur'an, surah al-Aḥzāb [33]: 37 — Allah sendiri yang menikahkan Zainab binti Jahsy kepada Nabi SAW tanpa wali, akad, maupun saksi:

    فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

    Artinya“ :*Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau (Muhammad) dengan dia (Zainab)…” (QS. al-Aḥzāb [33]: 37). Para mufassir menegaskan bahwa Zainab dinikahkan langsung oleh Allah*

tanpa wali dan tanpa akad — sebuah kekhususan Nabi SAW.

b. Sabda yang diriwayatkan al-Bukhārī, ketika Zainab membanggakan pernikahannya di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain:

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِيَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

Artinya" :*Zainab binti Jahsy membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi SAW, ia berkata: 'Keluarga kalianlah yang menikahkan kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh.'" (HR. al-Bukhārī, Kitāb at-Tauḥīd). Riwayat ini menegaskan pernikahan beliau berlangsung tanpa wali dari kalangan manusia*.

c. Kekhususan ini dikodifikasi para ulama dalam kitab-kitab khaṣāʾiṣ dan fikih — di antaranya an-Nawawī dalam Rawḍat aṭ-Ṭālibīn (Kitāb an-Nikāḥ, bab khaṣāʾiṣ Nabi SAW), as-Suyūṭī dalam al-Khaṣāʾiṣ al-Kubrā, dan al-Qasṭallānī dalam al-Mawāhib al-Ladunniyyah — dengan rumusan baku:

ومِن خصائصِه صلى الله عليه وسلم انعقادُ نكاحِه بغيرِ وليٍّ ولا شهودٍ

Artinya" :*Di antara kekhususan Nabi SAW adalah sahnya akad nikahnya tanpa wali dan tanpa saksi." Adapun bagi selain beliau, ketentuan wali dan dua saksi tetap berlaku secara mutlak, sehingga tidak seorang pun dapat berdalih dengan pernikahan Nabi SAW untuk membenarkan nikah tanpa wali dan saksi*.

12. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) — sebagaimana diriwayatkan al-Khallāl dalam As-Sunnah — ketika ditanya mana yang lebih utama antara memperbanyak ibadah pribadi atau menjelaskan keadaan penyeru kesesatan, menegaskan bahwa yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin lebih utama:

إِذَا صَلَّى وَصَامَ وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، هَذَا أَفْضَلُ

Artinya" :*Apabila ia shalat, berpuasa, dan beri'tikaf, maka (manfaat) itu hanyalah untuk dirinya sendiri; tetapi apabila ia berbicara mengenai ahli bid'ah, maka itu untuk kaum muslimin — inilah yang lebih utama." (Al-Khallāl, As-Sunnah). Menjelaskan keadaan penyebar penyimpangan demi melindungi umat termasuk amal yang manfaatnya meluas kepada kaum muslimin*.

13. Pendapat Imam al-Ājurrī (w. 360 H) dalam asy-Syarī'ah menegaskan tidak halalnya berdiam diri terhadap penyeru penyimpangan, agar orang awam tidak tertipu:

لَا يَحِلُّ لِمَنْ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ ... لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ الْجُهَّالُ

Artinya" :*Tidak halal bagi orang yang melihat seseorang termasuk ahli bid'ah untuk berdiam diri terhadapnya ... agar orang-orang awam tidak tertipu olehnya." (Al-Ājurrī, asy-Syarī'ah*.(

14. Pendapat al-Khaṭīb al-Bagdādī (w. 463 H) dalam al-Kifāyah menetapkan kewajiban menjelaskan keadaan pelaku penyimpangan agar dijauhi:

يَجِبُ بَيَانُ حَالِ الْمُبْتَدِعِ لِيُتَجَنَّبَ

Artinya" :*Wajib menjelaskan keadaan pelaku bid'ah agar ia dijauhi." (al-Khaṭīb al-Bagdādī, al-Kifāyah*.(

15. Pendapat Al-Imam an-Nawawī (w. 676 H) dalam Al-Ażkār menggolongkan penjelasan cacat (jarh) sebagai bagian dari nasihat, bukan gibah yang terlarang:

مِنَ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ

Artinya" :*Termasuk nasihat bagi kaum muslimin adalah menjelaskan cacat orang-orang yang tercela dari kalangan perawi, saksi, dan ahli bid'ah." (An-Nawawī, Al-Ażkār). An-Nawawī menegaskan bahwa taḥżīr semacam ini merupakan salah satu keadaan yang dikecualikan dari keharaman gibah karena maslahat syar'i*.

16. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam Majmū' al-Fatāwā menegaskan kewajiban mengingkari dan menjelaskan keadaan pelaku ketika ia menampakkan penyimpangannya, dan bahwa hal itu termasuk nasihat:

فَإِذَا أَظْهَرَ الرَّجُلُ الْبِدْعَةَ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَبَيَانُ حَالِهِ

... مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya" :*Apabila seseorang menampakkan bid'ahnya, maka wajib mengingkarinya dan menjelaskan keadaannya ... hal itu termasuk bentuk nasihat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin." (Ibnu Taimiyyah, Majmū' al-Fatāwā.*(

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG "NIKAH BATIN" ATAU "NIKAH DAUD" (NIKAH TANPA WALI DAN/ATAU TANPA SAKSI)

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Istilah nikah batin adalah nikah tanpa wali dan saksi, yaitu suatu praktik pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi salah satu atau kedua unsur berikut: (a) wali nikah yang sah, yaitu wali nasab yang memenuhi syarat atau wali hakim; dan (b) dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syar'i.
   Sebagian pelaku juga menyebut praktik ini sebagai "nikah Daud", yaitu dengan menisbatkannya kepada pendapat yang dikaitkan dengan Imam Dāwud aẓ-Ẓāhirī yang diklaim membolehkan nikah tanpa wali dan/atau saksi — suatu penisbatan yang tidak sah dan telah dibantah sebagaimana diuraikan dalam fatwa ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan
2. "Wali nikah yang sah" adalah wali nasab yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram; atau wali hakim yang diangkat oleh negara, apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menikahkan.
3. "Saksi yang sah" adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu mendengar serta memahami akad yang diucapkan pada saat akad berlangsung.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah adalah BATAL dan TIDAK SAH menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan wanita dewasa yang berakal tanpa wali adalah mauquf (tertahan) yang membutuhkan konfirmasi dan persetujuan wali, dan tetap tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran saksi.
2. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi yang sah adalah BATAL dan TIDAK SAH berdasarkan ijmā'ijmā' (konsensus) seluruh ulama dari keempat mazhab. Tidak ada seorang pun dari ulama mu'tabar yang membolehkan pernikahan tanpa saksi sama sekali.
3. "Nikah batin" — yang dilaksanakan tanpa wali dan tanpa saksi — hukumnya adalah HARAM dan BATAL secara mutlak berdasarkan Al-

Qur'an, As-Sunnah, dan ijmā'ijmā' ulama dari seluruh mazhab yang mu'tabar.

4. Hubungan seksual yang terjadi berdasarkan "nikah batin" hukumnya adalah ZINA, yang termasuk dalam dosa-dosa besar (al-kaba'ir) dan diancam dengan hukuman berat dalam syariat Islam.
5. Berdalih dengan pendapat Dāwud aẓ-Ẓāhirī dalam membolehkan "nikah batin" adalah tidak dibenarkan karena: (a) ijmā'ijmā' ulama menegaskan bahwa taqlid kepada selain imam mazhab yang empat tidak diperbolehkan; (b) al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-Haitamī mewajibkan had zina bagi yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan tanpa wali dan saksi; dan (c) Al-'Allamah al-Syibrāmalsī mengafirmasi keharaman mengikuti pendapat tersebut.
6. Klaim bahwa "nikah batin" merupakan pernikahan yang sah secara Islam adalah klaim yang BATIL, merupakan PEMUTARBALIKAN AJARAN AGAMA, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan PENODAAN AGAMA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
7. Memperingatkan masyarakat mengenai praktik "nikah batin" beserta para pelakunya, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, termasuk dalam kategori nasihat (an-naṣīḥah) dan taḥżīr yang diperintahkan syariat serta merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar; hal itu TIDAK termasuk gibah yang diharamkan, sepanjang didasarkan pada fakta yang benar, bertujuan melindungi agama dan masyarakat, serta tidak dimaksudkan untuk melampiaskan permusuhan pribadi atau mencemarkan nama baik tanpa dasar.

Ketiga : Rekomendasi

1. **Kementerian Agama Republik Indonesia dan Instansi Terkait:**
   a. Agar memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat sahnya nikah;
   b. Agar meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan yang sah sesuai syariat Islam dan dicatatkan secara resmi, terutama di kalangan masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan dalil agama.
2. **Aparat Penegak Hukum:**
   a. Agar memproses para pelaku "nikah batin" melalui jalur hukum pidana yang penuh dan tidak menempuh mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), guna memberikan efek jera yang nyata dan mencegah praktik serupa terulang kembali di masyarakat;
   b. Agar menelusuri dan mempertimbangkan dugaan penodaan agama dalam kasus-kasus di mana pelaku secara aktif mengklaim bahwa "nikah batin" adalah pernikahan yang sah menurut Islam, karena hal tersebut merupakan pemutarbalikan ajaran agama yang dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965;

c. Agar tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menggunakan dalih agama sebagai alasan peringan hukuman, mengingat justru penggunaan dalih agama itulah yang memperberat keadaan, karena menambahkan dimensi penodaan agama di atas perbuatan zina itu sendiri.

3. Masyarakat:

a. Agar tidak mempercayai klaim siapa pun yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan secara sah tanpa wali dan saksi, dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun;
b. Agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya praktik "nikah batin" atau praktik serupa di lingkungan mereka;
c. Agar memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan dalam keluarga memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah sesuai syariat Islam dan dicatatkan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Agar melakukan evaluasi berkala terhadap anak-anak mereka yang bermukim di asrama atau pondok pesantren, antara lain dengan menanyakan secara intensif dan penuh kehati-hatian apakah ada pihak yang pernah mengajak atau membujuk mereka untuk menikah selama berada di asrama.

4. Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren:

a. Agar mempertegas dan memperkuat pemahaman santri, siswa, dan masyarakat sekitar tentang rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam, serta konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak sah;
b. Agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukan keagamaan dan relasi guru–murid untuk melakukan tindakan yang menyalahi syariat, dan membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi santri atau anggota masyarakat yang mengalami penyimpangan serupa.

5. Para Ulama, Tokoh Agama, dan Da'i:

a. Agar secara aktif memperingatkan masyarakat mengenai bahaya praktik "nikah batin" dan segala bentuk penyalahgunaan dalil agama untuk melegitimasi zina;
b. Agar menjelaskan kepada umat rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam, serta menegaskan bahwa memperingatkan dari penyebar kesesatan termasuk nasihat, bukan gibah;
c. Agar menyampaikan peringatan (taḥżīr) tersebut dengan cara yang berdasarkan ilmu dan fakta, bertujuan melindungi umat, serta tidak dicampuri kepentingan atau permusuhan pribadi.
d. Agar tidak menutup-nutupi atau melarang penyebaran peringatan mengenai bahaya ajaran pelaku, karena menyampaikan dan menyebarkan peringatan terhadap kemungkaran demi melindungi umat merupakan bagian dari nahi munkar yang wajib, bukan sesuatu yang boleh dibungkam.

6. Para Korban, Saksi, dan Aktivis:

a. Agar tidak takut atau ragu untuk melaporkan praktik “nikah batin” yang mereka alami atau ketahui kepada pihak yang berwenang, karena melaporkan kemungkaran demi mencegah kerusakan yang lebih besar merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar;
b. Agar menyampaikan laporan berdasarkan fakta dan bukti yang benar, tanpa melebih-lebihkan atau menguranginya, sehingga penanganannya berjalan adil dan proporsional;
c. Agar meyakini bahwa mengungkap dan melaporkan praktik semacam ini dengan niat melindungi agama, kehormatan, dan masyarakat tidak termasuk gibah yang diharamkan, melainkan nasihat yang diperintahkan syariat.

Keempat **: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau menyebarluaskan fatwa ini.

Demikian fatwa ini ditetapkan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar demi menjaga agama (ḥifẓ al-din), kehormatan (ḥifẓ al-‘'irḍ), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : …… H / …… 2026 M

Ketua Komisi Fatwa,	Sekretaris Komisi Fatwa,
(_____)	(_____)

Mengetahui,
Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
(_____)	(_____)

مجلس العلماء الإندونيسي

كالمنتان الشرقية

الأمانة العامة: شارع ..... سمارندا، كالمنتان الشرقية

قرار فتوى

لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي بكالمنتان الشرقية

رقم: ...../MUI-Kaltim/...../٢٠٢٦

بموضوع

«النكاح الباطن» أو «النكاح الداودي»

(النكاح بغير وليٍّ و/أو بغير شاهدين)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنَّ لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي بكالمنتان الشرقية، بعد:

الحيثيات (المُلاحَظات:(

أ. أنَّ ظاهرة «النكاح الباطن» قد انتشرت في المجتمع، وصارت تُتَّخذ ذريعةً في وقائع التحرش والاعتداء الجنسي؛

ب. أنَّ من الناس من يدَّعي أنَّ «النكاح الباطن» نكاحٌ صحيحٌ شرعي، مستندًا في تجويزه إلى قولٍ نُسِب إلى الإمام داود الظاهري، فيزعم أنَّ العلاقة الواقعة ليست زنًا؛

ج. أنَّ هذا الادعاء يُفضي إلى إضلال المجتمع، ويَخدِش حُرمة مؤسسة النكاح المكرَّمة في الإسلام، ويُحتمل أن يُصنَّف تحريفًا للدين وإهانةً له وفق ما نصَّت عليه الأنظمة والقوانين المعمول بها؛

د. أنَّ لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي بكالمنتان الشرقية ترى ضرورةَ إصدار فتوى حازمةٍ شاملةٍ تحقيقًا لليقين القانوني للمجتمع ولأجهزة إنفاذ القانون في معالجة النوازل المشابهة.

وبالنظر إلى:

١ .الآيات القرآنية:

أ. قوله تعالى الدالُّ على أنَّ النكاح لا بدَّ أن يكون بإذن الوليِّ وعلمه:

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

﴿النساء: ٢٥﴾. وهذه الآية تشترط إذن الوليِّ (الأهل) صريحًا جزءًا لا ينفصل عن النكاح الصحيح.

ب. قوله تعالى المؤكِّد لولاية الوليِّ والمشعِر بأنَّ النكاح لا يتمُّ بدون مشاركته:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

﴿البقرة: ٢٣٢﴾. فالآية تُشعِر بأنَّ للوليِّ ولايةً على نكاح مَن تحت ولايته، إذ لا يكون النهي عن العَضْل ذا معنًى إلَّا إذا كان للوليِّ دورٌ واجبٌ يقوم به.

ج. قوله تعالى في حقوق النساء التي لا تترتَّب إلَّا على نكاحٍ صحيحٍ شرعًا:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

﴿النساء: ١٩﴾. وهذه الحقوق لا تنشأ إلَّا من نكاحٍ صحيح؛ و«النكاح الباطن» الذي لم تتحقَّق فيه أركان النكاح وشروط صحته لا يُرتِّب أيَّ حقٍّ ولا واجبٍ بين الطرفين.

د. قوله تعالى في النهي عن قُربان الزنا وعن كلِّ ما يُوصِل إليه:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

﴿الإسراء: ٣٢﴾.

هـ. قوله تعالى في الوعيد والحدِّ المقرَّر على الزاني:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

﴿النور: ٢﴾.

و. قوله تعالى الدالُّ على استثناء المظلوم من عموم النهي عن قول السوء والغيبة:

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۭوَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

﴿النساء: ١٤٨﴾. وهذه الآية دليلٌ على أنَّ بعض الغيبة والأقوال المحرَّمة مستثنًى بأحوالٍ معيَّنة.

٢. الأحاديث النبوية، ومنها:

أ. قوله ﷺ في لزوم الوليّ في كلّ نكاحٍ صحيح:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

(أخرجه أبو داود ٢٠٨٥، والترمذي ١١٠١، وابن ماجه ١٨٨١، وأحمد ٢٤٩٥٤، عن عائشة رضي الله عنها).

ب. قوله ﷺ في لزوم الوليّ وشاهدَي عدلٍ:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلْ

(أخرجه ابن حِبَّان ٤٠٧٥، والبيهقي ١٣٦٣٣، وصحَّحه ابن حِبَّان).

ج. قوله ﷺ في بطلان النكاح المعقود بغير إذن الوليّ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

(أخرجه أبو داود ٢٠٨٣، والترمذي ١١٠٢، وأحمد ٢٤٢٠٥، عن عائشة رضي الله عنها).

د. قوله ﷺ الدالُّ على أنَّ النكاح الصحيح لا بدَّ من إعلانه — وهو مناقضٌ لحقيقة «النكاح الباطن» المستور عن الوليّ والمجتمع:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

(أخرجه الترمذي ١٠٨٨، وابن ماجه ١٨٩٦، وأحمد ١٥٧٠٩). وهذا يدلُّ على أنَّ النكاح الصحيح ظاهرٌ معلومٌ عند الناس، لا شيءٌ يُكتَم ويُستَر.

هـ. قوله ﷺ في النهي عن السكوت على المعصية، والنهي عن تعيير الفاعل بما ليس من إقامة الحدِّ والحكم، والنهي عن الغيبة مع استثناء ما كان لإقامة الحقِّ:

الذنبُ شؤمٌ على غيرِ فاعلهِ، إنْ عيَّرَهُ ابتُلِيَ بهِ، وإنِ اغتابهَ أَثِمَ، وإنْ رضِيَ بهِ شاركَهُ.

(أخرجه الديلمي ٣١٩٦). وفيه النهي عن السكوت على المعصية إذا انتشرت، والنهي عمَّا لا صلة له بالنهي عن المنكر وإقامة الحقِّ.

٣. القواعد الأصولية:

أ. قاعدةٌ في دلالة الأمر على الوجوب (فيما يتعلَّق بالأمر بالنكاح بإذن الوليّ):

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوُجُوب

ومعناها: أنَّ الأصل في الأمر أن يكون للوجوب. والبيان: أنَّ قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ وَرَد بصيغة الأمر، فدلَّ على أنَّ استئذان الوليِّ في النكاح واجبٌ لا مجرَّد مستحبٍّ.

ب. قاعدةٌ في اقتضاء النهي الفسادَ والبطلان (فيما يتعلَّق بالنهي عن النكاح بغير وليٍّ):

النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ

والبيان: أنَّ قوله ﷺ بِبُطلان النكاح بغير إذن الوليِّ يدلُّ على أنَّ هذا النهي مُفضٍ مباشرةً إلى عدم صحة عقد النكاح وبطلانه حكمًا.

٤. القواعد الفقهية:

أ. قاعدةٌ في أنَّ الأصل في الفروج التحريم:

الأصل في الأبضاع التحريم

ومعناها: أنَّ الأصل في أمر الفروج والاستمتاع التحريمُ حتى يقوم دليل الحلِّ.

ب. قاعدةٌ في زيادة الاحتياط في الفروج — ولها صلةٌ بدعوى الجواز المنسوبة إلى داود الظاهري:

يحتاط فِي الْفُرُوجِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْأَمْوَالِ

ومعناها: أنَّ الاحتياط في أمر الفروج مطلوبٌ أكثر من الاحتياط في الأموال.

ج. قاعدةٌ في أنَّ الوطء في غير مِلك اليمين لا ينفكُّ عن مهرٍ (نكاحٍ صحيح) أو عقوبةٍ:

لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة

ومعناها: أنَّ كلَّ وطءٍ عدا وطء المملوكة لا بدَّ أن يقترن به مهرٌ (بنكاحٍ صحيح) أو عقوبةٌ.

د. قاعدةٌ في عدم اعتبار الجهل بما هو معلومٌ من الدين — وفي هذا السياق: تحريم النكاح بغير وليٍّ وشاهدَين:

كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل

ومعناها: أنَّ مَن جهل تحريم أمرٍ يعلمه غالب الناس فلا يُقبل عذره.

وبالاطلاع على:

١ .قول الإمام القُدُوري (ت ٤٢٨ هـ) في «مختصر القُدُوري» — وهو من متون المذهب الحنفي — مؤكِّدًا أنَّ الشهود شرطٌ مطلقٌ لصحة النكاح، حتى في المذهب الأخفِّ في مسألة الوليّ:

"وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ رَجُلْ وَامْرَأَتَيْنِ"

(«مختصر القُدُوري»). وهذا يُثبِت أنَّ النكاح بغير شهودٍ باطلٌ عند الحنفية جميعًا.

٢. ما جاء في «الفقه على المذاهب الأربعة» (٤/٤٦) جامعًا لأقوال المذاهب الأربعة:

"قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى عَدِّ الْوَلِيِّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ لَا يَتَحَقَّقُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِدُونَهُ وَاصْطَلَحَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدِّهِ شَرْطًا لَا رُكْنًا"

(«الفقه على المذاهب الأربعة» ٤/٤٦). وأمَّا الشهود فقد اتَّفقت المذاهب كلُّها على أنَّ النكاح لا يصحُّ بدونهم.

٣. فتوى الحافظ ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ) الصريحة في تحريم تقليد داود الظاهري في النكاح وبيان أثره الحكمي:

"لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَمَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ خَالٍ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ"

(«فتاوى ابن حجر الهيتمي»).

٤. ما في كتاب «التقليد والاجتهاد» (ص ٢٢–٢٣)، وقوَّاه العلَّامة الشِّبْرامَلِّسي في حواشيه على «النهاية»:

"وَمِنْهَا مَا نُسِبَ إِلَى دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ مِنَ جَوَازِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ وَمِمَّنْ يُصحُّ بِحُرْمَةِ تَقْلِيدِهِ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْعَلَّامَةُ الشِّبْرَامَلْسِيُّ فِي حَوَاشِي النِّهَايَةِ"

(«التقليد والاجتهاد» ص ٢٢–٢٣).

٥. قول الإمام ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ) في «المحلَّى بالآثار» (ج ٩) — وهو أصل مذهب الظاهرية — فإنَّه يمنع النكاح بغير وليٍّ لجميع النساء، ثيِّبًا كانت أو بكرًا؛ فالمذهب الذي يُتَّخذ سندًا هو في الحقيقة رادٌّ لهذه الممارسة:

''مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ – ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا – إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الأَبِ، أَوِ الإِخْوَةِ، أَوِ الْجَدِّ، أَوِ الأَعْمَامِ، أَوْ بَنِي الأَعْمَامِ – وَإِنْ بَعُدُوا – وَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ أَوْلَى''

(«المحلَّى بالآثار» ج ٩). فتبيَّن أنَّ «المحلَّى» — المرجع الأمَّ للمذهب الظاهري — ليس كتابًا يُجوِّز النكاح بغير وليٍّ، بل هو رادٌّ له.

٦. قول القاضي ابن رشد (ت ٥٩٥ هـ) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (ج ٢ ص ٣٦) ناقلًا قول داود الظاهري على وجهٍ مقيَّدٍ — يُسقِط شرط الوليّ في الثيّب فقط، لا الشهود، ولا في البكر:

''وَفَرَّقَ دَاوُدُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي الْبِكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ''

(«بداية المجتهد» ج ٢ ص ٣٦).

٧. قول العلَّامة عبد الوهَّاب الشعراني (ت ٩٧٣ هـ) في «الميزان الكبرى» (ج ٢ ص ١٠٢) ناقلًا قول داود بالقيد نفسه — إسقاط شرط الوليّ في الثيّب فقط، دون أيّ إشارةٍ إلى إسقاط الشهود:

''وَمَعَ قَوْلِ دَاوُدَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا صَحَّ''

(«الميزان الكبرى» ج ٢ ص ١٠٢). وبهذا فإنَّ أوثق نقلَين لقول داود — «بداية المجتهد» و«الميزان الكبرى» — إنَّما يُسقِطان الوليَّ في الثيّب ولا يُسقِطان الشهود بحالٍ؛ فدعوى «النكاح بغير وليٍّ ولا شهودٍ» لا سند لها حتى في قول داود نفسه.

٨. قول عبد الرحمن باعلوي في «بغية المسترشدين» (ص ١٤) مؤكِّدًا الإجماع الذي نقله ابن الصلاح على منع تقليد غير الأئمة الأربعة:

''مَسْأَلَةٌ: نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَيْ حَتَّى الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَنِ الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى، لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِنِسْبَتِهَا لِأَرْبَابِهَا بِأَسَانِيدَ تَمْنَعُ التَّحْرِيفَ وَالتَّبْدِيلَ''

(«بغية المسترشدين» ص ١٤). فالاستدلال بقول داود الظاهري مردودٌ كذلك من جهة قواعد التقليد نفسها.

٩. وفي الكتاب نفسه «المحلَّى بالآثار» (ج ٩) أوجب ابن حزم الوليمةَ على كلِّ مَن تزوَّج — وهو عنصر إعلانٍ يستحيل تحقُّقه في «النكاح الباطن» المستور، حتى على المذهب الظاهري الذي يُتَّخذ سندًا:

"مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُولِمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"

(«المحلَّى بالآثار» ج ٩). فالوليمة المعلَنة المعلومة عند الناس جزءٌ من النكاح حتى في المذهب الظاهري؛ فـ«النكاح الباطن» المتعمَّد استتاره مناقضٌ للمذهب الذي احتُجَّ به.

١٠. قول الحافظ ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى» مقرِّرًا أنَّ الخلاف الضعيف لا يُعتبر، فلو سُلِّم صحة النسبة إلى داود لم يُلتفَت إليه في هذه المسألة:

"فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ دَاوُدَ قَائِلٌ بِحِلِّ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، عَلَى أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنَعُوا مِنْ تَقْلِيدِهِ كَسَائِرِ الظَّاهِرِيَّةِ لِأَنَّهُمْ لِإِنْكَارِهِمُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ يَرْتَكِبُونَ السَّفْسَافَ مِنَ الْآرَاءِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِآرَائِهِمْ ... بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ شَاذًّا، فَاتَّضَحَ الْحَدُّ فِيهِ وَبَطَلَ الْقَوْلُ الْمُخَالِفُ لِذَلِكَ"

(«الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي، ج ٤).

١١. أنَّ من خصائص النبي ﷺ التي قرَّرها العلماء انعقادَ نكاحه بغير وليٍّ ولا شهودٍ — وهو استثناءٌ من القاعدة العامة المشترطة للوليِّ والشاهدَين، وفي ذلك تأكيدٌ على أنَّ هذا الباب مسدودٌ في حقِّ غيره ﷺ. ومستند هذه الخصيصة ما يلي:

أ. القرآن الكريم، سورة الأحزاب [٣٣]: ٣٧ — فالله تعالى هو الذي زوَّج زينب بنت جحش للنبي ﷺ بغير وليٍّ ولا عقدٍ ولا شهودٍ:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

﴿الأحزاب: ٣٧﴾. وقد أكَّد المفسِّرون أنَّ زينب زوَّجها الله تعالى مباشرةً بغير وليٍّ ولا عقدٍ — وهي خصيصةٌ للنبي ﷺ.

ب. ما أخرجه البخاري حين كانت زينب تفخر بنكاحها على أزواج النبي ﷺ:

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِيَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

(أخرجه البخاري، كتاب التوحيد). وهذه الرواية تؤكّد أنَّ نكاحه ﷺ وقع بغير وليٍّ من البشر.

ج. أنَّ هذه الخصيصة مدوَّنةٌ في كتب الخصائص والفقه — ومنها «روضة الطالبين» للنووي (كتاب النكاح، باب خصائص النبي ﷺ)، و«الخصائص الكبرى» للسيوطي، و«المواهب اللدنية» للقَسْطَلَّاني — بالصيغة المشهورة:

"ومِن خصائصِه صلى الله عليه وسلم انعقادُ نكاحِه بغيرِ وليٍّ ولا شهودٍ"

وأمَّا غيره ﷺ فيبقى شرط الوليّ والشاهدَين في حقِّه على الإطلاق؛ فلا يسوغ لأحدٍ أن يحتجَّ بنكاح النبي ﷺ على تجويز النكاح بغير وليٍّ وشاهدَين.

١٢. قول الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) — كما رواه الخلَّال في «السنة» — حين سُئل عمَّا هو أفضل: الإكثار من العبادة الخاصة أم بيان حال الداعي إلى الضلال، فقرَّر أنَّ ما كان نفعه عائدًا على المسلمين أفضل:

"إِذَا صَلَّى وَصَامَ وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، هَذَا أَفْضَلُ"

(الخلَّال، «السنة»). فبيان حال ناشر الانحراف حمايةً للأمة من الأعمال التي يتعدَّى نفعها إلى المسلمين.

١٣. قول الإمام الآجُرِّي (ت ٣٦٠ هـ) في «الشريعة» مؤكِّدًا عدم حِلِّ السكوت عن الداعي إلى الانحراف لئلَّا يُغترَّ به العوامُّ:

"لَا يَحِلُّ لِمَنْ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ ... لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ الْجُهَّالُ"

(الآجُرِّي، «الشريعة»).

١٤. قول الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) في «الكفاية» مقرِّرًا وجوب بيان حال المبتدع ليُتجنَّب:

"يَجِبُ بَيَانُ حَالِ الْمُبْتَدِعِ لِيُتَجَنَّبَ"

(الخطيب البغدادي، «الكفاية»).

١٥. قول الإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ) في «الأذكار» جاعلًا الجرحَ من النصيحة لا من الغيبة المحرَّمة:

"مِنَ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ"

(النووي، «الأذكار»). وقد أكَّد النووي أنَّ التحذير من هذا القبيل من الأحوال المستثناة من تحريم الغيبة لِما فيه من المصلحة الشرعية.

١٦. قول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) في «مجموع الفتاوى» مؤكِّدًا وجوب الإنكار وبيان الحال إذا أظهر صاحبه انحرافه، وأنَّ ذلك من النصيحة:

"فَإِذَا أَظْهَرَ الرَّجُلُ الْبِدْعَةَ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَبَيَانُ حَالِهِ ... مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"

(ابن تيمية، «مجموع الفتاوى»).

وتوكُّلًا على الله سبحانه وتعالى

قرَّرت

تقرير: فتوى بشأن «النكاح الباطن» أو «النكاح الداودي» (النكاح بغير وليٍّ و/أو بغير شهودٍ(

أولًا: أحكامٌ عامة

المقصود في هذه الفتوى بما يلي:

١. «النكاح الباطن» هو النكاح بغير وليٍّ وشاهدَين، أي ممارسةٌ للنكاح تُقام دون تحقُّق أحد الأمرَين أو كليهما: (أ) وليُّ نكاحٍ صحيحٍ، وهو وليُّ النسب المستوفي للشروط أو وليُّ الحاكم؛ و(ب) شاهدان رجلان مستوفيان للشروط الشرعية.

وبعض المتعاطين له يسمُّونه أيضًا «النكاح الداودي»، نسبةً إلى القول المنسوب إلى الإمام داود الظاهري المدَّعى أنَّه يُجوِّز النكاح بغير وليٍّ و/أو شهودٍ — وهي نسبةٌ غير صحيحةٍ ومردودةٌ على ما تقرَّر في هذه الفتوى.

٢. «وليُّ النكاح الصحيح» هو وليُّ النسب المسلم البالغ العاقل الحرُّ العدل غير المحرم بحجٍّ أو عمرةٍ؛ أو وليُّ الحاكم الذي تُعيّنه الدولة إذا لم يكن وليُّ النسب موجودًا، أو كان مجهول المكان، أو عاضلًا ممتنعًا عن التزويج.

٣. «الشاهد الصحيح» هما رجلان مسلمان بالغان عاقلان عدلان قادران على سماع العقد المتلفَّظ به وفهمه حال انعقاده.

ثانيًا: الأحكام الشرعية

١. النكاح المعقود بغير وليٍّ صحيحٍ باطلٌ وغير صحيحٍ عند الشافعية والمالكية والحنابلة. وأمَّا عند الحنفية فنكاح المرأة البالغة العاقلة بغير وليٍّ موقوفٌ يحتاج إلى إقرار الوليِّ وإجازته، ولا يُعدُّ صحيحًا بحالٍ مع غياب الشهود.

٢. النكاح المعقود بغير شهودٍ صحيحين باطلٌ وغير صحيحٍ بإجماع علماء المذاهب الأربعة كافةً؛ ولم يُجوِّز أحدٌ من العلماء المعتبرين النكاح بلا شهودٍ أصلًا.

٣. «النكاح الباطن» — المعقود بغير وليٍّ ولا شهودٍ — حرامٌ وباطلٌ على الإطلاق، بدلالة القرآن والسنة وإجماع علماء المذاهب المعتبرة كلِّها.

٤. العلاقة الجنسية الواقعة بناءً على «النكاح الباطن» زنًا، وهو من الكبائر، ومتوعَّدٌ عليه بالعقوبة الشديدة في الشريعة الإسلامية.

٥. الاحتجاج بقول داود الظاهري في تجويز «النكاح الباطن» غير سائغٍ؛ لأنَّ: (أ) إجماع العلماء يقرِّر منع تقليد غير الأئمة الأربعة؛ (ب) الحافظ ابن حجر الهيتمي أوجب حدَّ الزنا على مَن وطئ في نكاحٍ خالٍ من الوليِّ والشهود؛ (ج) العلَّامة الشِّبْرامَلِّسي أكَّد تحريم تقليد ذلك القول.

٦. دعوى أنَّ «النكاح الباطن» نكاحٌ صحيحٌ شرعًا دعوى باطلةٌ، وهي تحريفٌ لتعاليم الدين وقلبٌ لها، ويمكن تصنيفها إهانةً للدين وفق ما نصَّ عليه القانون رقم ١٩٦٥/PNPS/١ بشأن الوقاية من إساءة استخدام الدين و/أو إهانته.

٧. تحذير المجتمع من ممارسة «النكاح الباطن» ومن القائمين عليها، والإبلاغ عنهم إلى الجهات المختصة، داخلٌ في باب النصيحة والتحذير المأمور بهما شرعًا، وهو من الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر؛ وليس من الغيبة المحرَّمة، ما دام مبنيًّا على الوقائع الصحيحة، مقصودًا به حماية الدين والمجتمع، غير مقصودٍ به تصفية العداوات الشخصية أو التشهير بلا مستندٍ.

ثالثًا: التوصيات

١. وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والجهات ذات الصلة:

أ. تشديد الرقابة على ممارسات النكاح غير المسجَّلة وغير المستوفية لشروط صحة النكاح؛

ب. تكثيف التوعية بأهمية النكاح الصحيح وفق الشريعة الإسلامية وتسجيله رسميًّا، وبخاصةٍ في الأوساط المعرَّضة لإساءة استخدام الأدلة الشرعية.

٢. أجهزة إنفاذ القانون:

أ. ملاحقة القائمين بـ«النكاح الباطن» عبر المسار الجزائي الكامل، دون اللجوء إلى آلية العدالة التصالحية (restorative justice)، تحقيقًا للردع الفعلي ومنعًا لتكرار مثل هذه الممارسة في المجتمع؛

ب. تتبُّع شُبهة إهانة الدين والنظر فيها في القضايا التي يدَّعي فيها الفاعل صريحًا أنَّ «النكاح الباطن» نكاحٌ صحيحٌ في الإسلام، فإنَّ ذلك تحريفٌ لتعاليم الدين يمكن تجريمه وفق القانون رقم ١/PNPS/١٩٦٥؛

ج. عدم إتاحة المجال للفاعل لاتخاذ الدين ذريعةً للتخفيف من العقوبة، إذ إنَّ اتخاذ هذه الذريعة نفسه ظرفٌ مشدِّدٌ، لأنَّه يضيف بُعد إهانة الدين إلى جريمة الزنا ذاتها.

٣. المجتمع:

أ. عدم تصديق دعوى أيِّ أحدٍ يقول بإمكان عقد نكاحٍ صحيحٍ بغير وليٍّ وشاهدَين، بأيِّ صورةٍ كانت وبأيِّ ذريعةٍ؛

ب. المبادرة بالإبلاغ إلى الجهات المختصة عند العلم بوجود ممارسة «النكاح الباطن» أو ما يشابهها في محيطهم؛

ج. التأكُّد من أنَّ كلَّ نكاحٍ يُعقد في الأسرة مستوفٍ لأركان النكاح وشروط صحته وفق الشريعة الإسلامية، ومسجَّلٌ رسميًّا وفق الأنظمة المعمول بها؛

د. المتابعة الدورية لأبنائهم المقيمين في المهاجع أو المعاهد الدينية (البيسانترين)، ومن ذلك سؤالهم بعنايةٍ وتدقيقٍ عمَّا إذا كان أحدٌ قد دعاهم أو أغراهم بالزواج أثناء إقامتهم في المهجع.

٤. المؤسسات التعليمية الإسلامية والمعاهد الدينية:

أ. تأكيد وتقوية فهم الطلاب والدارسين والمجتمع المحيط لأركان النكاح وشروط صحته وفق الشريعة الإسلامية، وللآثار الحكمية للنكاح غير الصحيح؛

ب. الحذر من الذين يستغلُّون المكانة الدينية وعلاقة الشيخ بالطالب لارتكاب ما يخالف الشريعة، وبناء آليةِ إبلاغٍ آمنةٍ للطلاب أو لأفراد المجتمع الذين يتعرَّضون لمثل هذا الانحراف.

٥. العلماء ووجهاء الدين والدعاة:

أ. التحذير الفعَّال للمجتمع من خطر ممارسة «النكاح الباطن» ومن كلِّ صور إساءة استخدام الأدلة الشرعية لتسويغ الزنا؛

ب. بيان أركان النكاح وشروط صحته للأمة وفق الشريعة، والتأكيد على أنَّ التحذير من ناشر الضلال نصيحةٌ لا غيبةٌ؛

ج. إبلاغ هذا التحذير على وجهٍ مبنيٍّ على العلم والواقع، مقصودًا به حماية الأمة، خاليًا من الأهواء والعداوات الشخصية؛

د. عدم التستُّر على التحذير من خطر ما يبثُّه الفاعل أو منع نشره، فإنَّ إبلاغ التحذير من المنكر ونشره حمايةً للأمة من النهي عن المنكر الواجب، لا من الأمور التي يسوغ كتمانها.

٦. المجني عليهم والشهود والناشطون:

أ. عدم الخوف أو التردُّد في الإبلاغ عن ممارسة «النكاح الباطن» التي تعرَّضوا لها أو علموا بها إلى الجهات المختصة، فإنَّ الإبلاغ عن المنكر دفعًا لفسادٍ أكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

ب. تقديم البلاغ مبنيًّا على الوقائع والأدلة الصحيحة، دون مبالغةٍ ولا تنقيصٍ، ليكون التعامل معه عادلًا متناسبًا؛

ج. اليقين بأنَّ كشف مثل هذه الممارسة والإبلاغ عنها بنيَّة حماية الدين والعِرض والمجتمع ليس من الغيبة المحرَّمة، بل هو من النصيحة المأمور بها شرعًا.

رابعًا: أحكامٌ ختامية

١. تُعمل هذه الفتوى من تاريخ إقرارها، وإذا تبيَّنت الحاجة إلى تصحيحٍ مستقبلًا فستُصحَّح وتُستكمل على الوجه اللائق.

٢. يُهاب بنشر هذه الفتوى وتعميمها ليعلمها كلُّ مسلمٍ ومن يحتاج إليها.

وبهذا أُقرَّت هذه الفتوى بكامل المسؤولية، أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، حفظًا للدين، وحفظًا للعِرض، وحفظًا للعقل، وحفظًا للنسل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ علينا جميعًا بالتوفيق والهداية.

حُرِّر في: سمارندا

التاريخ: ..... هـ / ..... ٢٠٢٦ م

رئيس لجنة الفتوى،

(_____)

أمين لجنة الفتوى،

(_____)

للعلم،

مجلس إدارة

مجلس العلماء الإندونيسي بكالمنتان الشرقية

الرئيس العام،

(_____)

الأمين العام،

(_____)